KABUPATEN PASURUAN

GUNA KARYA SARANA BHAKTI

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PASURUAN

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
DAFTAR GAMBAR 2
DAFTAR TABEL 3
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-5
1.4 Maksud dan Tujuan I-7
1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD I-8
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN I TAHUN 2024 ..... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I II-1
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-2
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-5
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan III-6
3.2.2 Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah III-10
3.2.3 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah III-12
3.2.4 Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah III-14
3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-14
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024 ..... IV-2
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK V-1
BAB VI PENUTUP VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Rekapitulasi Capaian Kinerja (Triwulan II) Program/Kegiatan/ Subkegiatan Perangkat Daerah yang Tidak Memenuhi/ Memenuhi/Melebihi Target Triwulan II Tahun 2024 ..... II-4

Tabel 3.1 Capaian dan Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 – 2024 ..... III-3

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 s.d 2022 ..... III-5

Tabel 3.3 Realisasi Tahun 2023, Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024..... III-6

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 s.d 2022 ..... III-9

Tabel 3.5 Realisasi Tahun 2023, Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024..... III-11

Tabel 3.6 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 s.d 2022 ..... III-13

Tabel 3.7 Realisasi dan Target/Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 s.d 2024 ..... III-13

Tabel 4.1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026..... IV-1

Tabel 4.2 Keselarasan Arah Kebijakan, Tema Pembangunan, Permasalahan Strategis-Prioritas Pembangunan Tahun 2024 ..... IV-2

Tabel 4.3 Persandingan Tema Pembangunan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat..... IV-4

Tabel 4.4 Persandingan/Pemetaan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat..... IV-4

Tabel 4.5 Program Pendukung Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ..... IV-11

Tabel 4.6 Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 ..... IV-85

Tabel 4.7 Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2024 ..... IV-86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen I-6
Gambar 4.1 Grand Design RKPD Kabupaten Pasuruan IV-7

BUPATI PASURUAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Pasa 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
16. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan

Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
26. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disebut KUPA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode sisa 1 (satu) tahun.
6. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD (Perangkat Daerah) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (PRKA PD) setelah disepakati dengan DPRD.
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut PAPBD adalah PAPBD Kabupaten Pasuruan.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(2) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun KUPA dan P-PPAS.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juli 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Juli 2024.
SEKRETARIS DAERAH,

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 17 Tahun 2024
TANGGAL : 16 Juli 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun berjalan. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD menjadi acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun perencanaan tahunan (rencana kerja / Renja). Selain itu, RKPD juga menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun berjalan, sampai dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan.

Dalam pelaksanaannya, APBD yang telah ditetapkan akan dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal. Guna mengantisipasi hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, telah diatur untuk dapatnya dilakukan perubahan RKPD. Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada tahun 2024 ini terjadi beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan saat penyusunan APBD Tahun 2024, antara lain : adanya perubahan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dana transfer (DBHCHT dan DAK), pergeseran belanja Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian target kinerja daerah dan perangkat daerah, serta adanya ketidaksesuaian proyeksi potensi keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pada tahun 2024. Dengan adanya perubahan proyeksi potensi keuangan daerah, sebagian besar anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 mengalami pergeseran atau penyesuaian. Pergeseran dan penyesuaian anggaran akan berpengaruh pada capaian kinerja Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, sehingga mungkin akan dilakukan perubahan target kinerja yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan perhitungan kembali ketersediaan anggaran dan kebutuhan belanja daerah, serta penetapan target kinerja pada tahun 2024.

Adapun alasan yang mendasar dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah :

a. Penyesuaian dengan pendapatan dan penggunaan dana transfer;
b. Penyesuaian kegiatan-kegiatan mendahului perubahan;
c. Penyesuaian perubahan indikator kinerja sub kegiatan, kegiatan dan indikator kinerja program;
d. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah;
e. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada dana transfer (DAK dan DBHCHT) dan perubahan peraturan penggunaan dana transfer (DBHCHT).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencananaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan

Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1/1819.A/SJ tanggal 22 April 2024 Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait DAK Tahun 2024;
20. Surat Dirjen Keuda Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tanggal 15 Desember 2024 Hal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH Dr, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 202 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementrian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementrian/Lembaga. Perencanaan nasional diwujudkan melalui perencanaan pembangunan tingkat daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.1 berikut :

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen

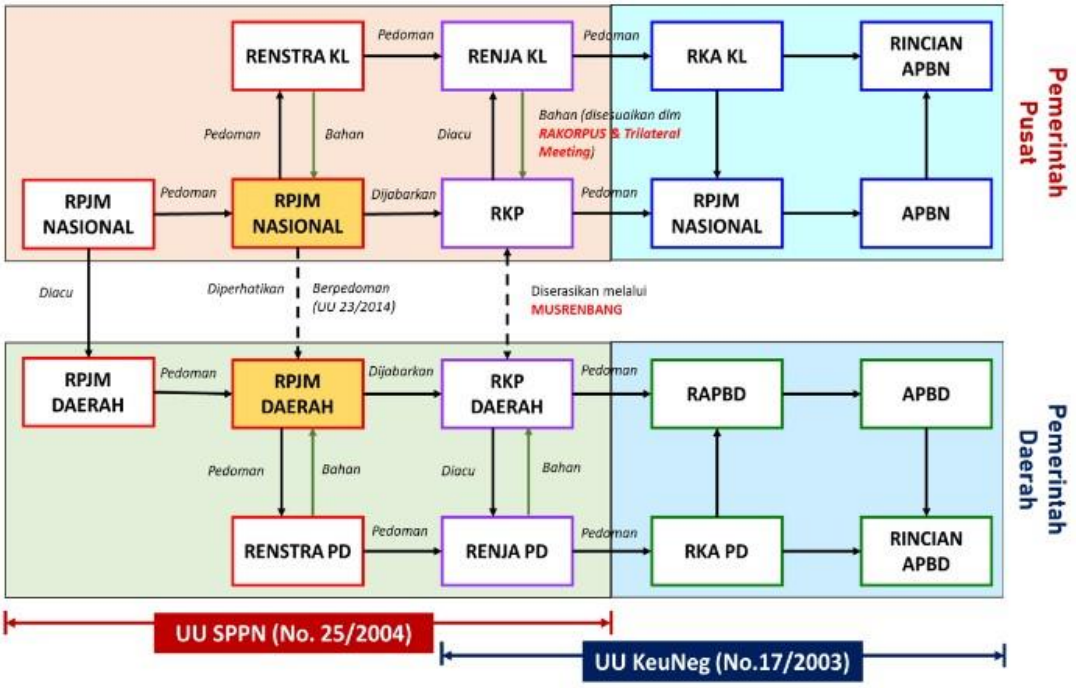

Sumber: Kemendagri, 2018
Keterangan: Pada periode 2024-2026 RPJMD diganti RPD

INMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2022 mengamanatkan penyusunan RPD untuk periode 2024-2026 untuk Bupati yang masa jabatannya berakhir di tahun 2023, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Pasuruan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2024 yang berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan isu strategis di Kabupaten Pasuruan.

Dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBN dan APBD. Oleh karena itu, program-program pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD tahun 2024, menjadi acuan dalam

penyusunan Perubahan KUA-PPAS APBD Kabupaten Pasuruan tahun 2024 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan RAPBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Pasuruan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2024 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum APBD Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2024 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional; memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Hubungan Antar Dokumen

1.4. Maksud dan Tujuan

1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai dengan Tribulan II Tahun 2024

Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Penutup

BAB II
EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah tahapan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Dalam rangka menjamin terlaksananya Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah secara signifikan, maka dilakukan evaluasi atas RKPD yang telah disusun. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah lingkup kabupaten/kota diamanatkan pada Pasal 305-306 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam pasal tersebut tertera bahwa evaluasi mencakup sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Evaluasi hasil RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa target rencana program, kegiatan, sub kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah yang direpresentasikan melalui tujuan atau sasaran pembangunan daerah. Evaluasi pencapaian prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah dilakukan melalui penilaian pencapaian hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024 berupa capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024. Penilaian capaian kinerja dan anggaran tersebut berpatokan pada target akhir periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 dan Renstra perangkat daerah tahun 2024-2026. Hasil penilaian disajikan dengan menggunakan formulir E-60 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana lampiran.

Pengukuran capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan terhadap target tahun 2024 yang ditetapkan dalam DPA perangkat daerah, berdasarkan target realisasi triwulan II, secara keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata program/kegiatan/sub kegiatan yang mencapai dan melebihi target sebanyak 64% dengan rincian:

1. Program yang melebihi dan mencapai target sejumlah 180 atau 57,88% sedangkan yang tidak mencapai 131 atau 42,12%;
2. Kegiatan yang melebihi dan mencapai target sejumlah 538 atau 64,28% sedangkan yang tidak mencapai 299 atau 35,72%;
3. Sub Kegiatan yang melebihi dan mencapai target sejumlah 1.386 atau 64,77% sedangkan yang tidak mencapai target sejumlah 754 atau 35,23%. Rekapan capaian kinerja program/kegiatan/ subkegiatan tersebut disajikan pada tabel 2.2.

Faktor-faktor yang pendorong ketercapaian target kinerja program/ kegiatan/sub kegiatan, dapat diidentifikasi antara lain:

1. Adanya peraturan perundang-undangan, petunjuk teknik, petunjuk operasional sebagai panduan;
2. Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur;
3. Adanya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
4. Adanya dukungan pendanaan dari APBD, DAK, DBHCHT dan dana lainnya;
5. Ketersedian sarana dan prasarana yang memadai;
6. Adanya komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah;
7. Tersedia media komunikasi dan informasi sebagai penunjang dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan;
8. Adanya dukungan baik internal maupun eksternal serta koordinasi yang baik di dalam lingkungan Perangkat Daerah.

Adapun faktor-faktor yang menghambat ketercapaian target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, dapat identifikasi antara lain:

1. Adanya rasionalisasi anggaran dan pergeseran anggaran sehingga beberapa kegiatan yang masuk dalam perencanaan awal tidak bisa dilaksanakan dan ditunda;
2. Anggaran beberapa sub kegiatan belum terserap dan masih dibawah target tribulan II dikarenakan di pagu serta rincian Belanja DAK NON fisik BOKB dan PPA belum menyesuaikan dengan juknis;

3. Penyediaan Paket Barang Cetakan dan Penggandaan tidak bisa dilaksanakan dan ditunda karena mengalami rasionalisasi anggaran dan pergeseran anggaran sesuai hasil evaluasi ulang sehingga baru bisa dilaksanakan setelah dokumen perubahan ditetapkan dan disahkan;
4. Koordinasi dalam penyusunan jadwal pekerjaan fisik yang kurang efektif;
5. Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum bisa melaksanakan penyerapan anggaran pada semester 1 dikarenakan penyelesaian pekerjaan pada akhir bulan Juni.

Berdasarkan hasil analisis capaian triwulan II tersebut, maka dapat diambil beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada tahun 2024 triwulan II berikutnya, antara lain: (1) Perangkat Daerah harus terus melakukan pendampingan dan pemantauan proses pergeseran pada aplikasi dan melakukan percepatan pelaksanaan setelah dokumen perubahan ditetapkan; (2) Memaksimalkan penyerapan anggaran dan kinerja di tribulan berikutnya sesuai dengan perencanaan anggaran dan rencana aksi; (3) Bagi Perangkat Daerah yang menerima DAK Fisik, DAK Non Fisik, DBHC-HT dan dana transfer lainnya agar segera menyesuaikan dengan juknis; (4) Melaksanakan percepatan pekerjaan fisik pada tribulan berikutnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; (5) Perangkat Daerah harus memprioritaskan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung kinerja sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.

Realisasi belanja seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 (triwulan II) sebesar Rp 1.498.372.745.993,00 yang berarti mencapai 37,13% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4.035.649.937.779,00.

Tabel 2.2. Rekapitulasi *Capaian Kinerja* (Triwulan II) Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah yang Tidak Memenuhi/Memenuhi/Melebihi Target Triwulan II Tahun 2024

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
1.1	UP Bidang Pendidikan	0	4	0	100,00	0	14	1	100,00	17	55	4	77,63
1.2	UP Bidang Kesehatan												
	Dinas Kesehatan	5	2	0	28,57	5	14	0	73,68	29	51	6	66,28
	RSUD Bangil	0	1	1	100,00	0	1	1	100,00	1	3	0	75,00
	RSUD Grati	0	2	0	100,00	0	2	0	100,00	0	3	0	100,00
1.3	UP Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
	Dinas SDA, Cipta Karya dan Tata Ruang	6	0	2	25,00	15	0	4	21,05	33	22	3	43,10
	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	0	4	0	100,00	0	8	0	100,00	1	18	0	94,74
1.4	UP Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4	0	0	0,00	11	1	0	8,33	22	11	0	33,33
1.5	UP Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat												
	Satuan Polisi Pamong Praja	3	0	0	0,00	7	2	2	36,36	15	6	10	51,61
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	0	50,00	7	4	0	36,36	24	17	0	41,46

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
1.6	UP Bidang Sosial	2	4	0	66,67	6	10	0	62,50	15	36	0	70,59
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2.1	UP Bidang Tenaga Kerja	1	3	0	75,00	9	5	2	43,75	17	16	4	54,05
2.2	UP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	2	0	40,00	10	6	0	37,50	22	9	0	29,03
2.3	UP Bidang Pangan	3	1	0	25,00	4	2	0	33,33	4	4	0	50,00
2.4	UP Bidang Pertanahan	3	1	0	25,00	3	1	0	25,00	3	2	0	40,00
2.5	UP Bidang Lingkungan Hidup	1	9	1	90,91	2	19	2	91,30	6	47	7	90,00
2.6	UP Bidang Administrasi Kependudukan	1	4	0	80,00	4	11	0	73,33	10	18	0	64,29

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
	dan Pencatatan Sipil												
2.7	UP Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3	3	0	50,00	2	7	1	80,00	4	24	4	87,50
2.8	UP Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	1	0	33,33	0	6	2	100,00	17	13	3	48,48
2.9	UP Bidang Perhubungan	0	2	0	100,00	0	23	0	100,00	14	49	6	79,71
2.10	UP Bidang Komunikasi dan Informatika	3	0	0	0,00	8	1	0	11,11	1	34	0	97,14
2.11	UP Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	4	1	71,43	0	10	2	100,00	8	14	5	70,37

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
2.12	UP Bidang Penanaman Modal	0	6	0	100,00	2	11	0	84,62	8	19	7	76,47
2.13	UP Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0	4	0	100,00	0	15	0	100,00	1	46	0	97,87
2.14	UP Bidang Statistik	0	1	0	100,00	1	0	0	0,00	0	3	0	100,00
2.15	UP Bidang Persandian	1	0	0	0,00	1	0	0	0,00	0	3	0	100,00
2.16	UP Bidang Kebudayaan	0	5	0	100,00	0	7	0	100,00	0	10	3	100,00
2.17	UP Bidang Perpustakaan	0	2	0	100,00	1	3	0	75,00	3	7	0	70,00
2.18	UP Bidang Kearsipan	1	1	1	66,67	2	6	5	84,62	3	13	14	90,00
3	Urusan Pemerintahan Pilihan												
3.1	UP Bidang Perikanan	0	5	0	100,00	0	16	1	100,00	1	43	1	97,78

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
3.2	UP Bidang Pariwisata	0	5	0	100,00	4	9	0	69,23	9	30	3	78,57
3.3	UP Bidang Pertanian												
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5	1	0		10	3	0		27	7	0	20,59
3.4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	6	1	100,00	4	16	7	85,19	13	33	6	75,00
	UP Bidang Perdagangan	3	2	2	57,14	5	9	1	66,67	8	19	2	72,41
3.5	UP Bidang Perindustrian	2	1	0	33,33	1	3	0	75,00	2	4	1	71,43
3.6	UP Bidang Transmigrasi	1	0	0	0,00	1	0	0	0,00	1	0	0	0,00
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan												
4.1	Sekretariat Daerah	0	3	0	100,00	5	10	1	#REF!	12	41	2	78,18
4.2	Sekretariat DPRD	0	0	2	100,00	1	3	12	#REF!	7	32	6	84,44

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan												
5.1	Unsur Perencanaan	1	2	0	66,67	3	11	0	78,57	8	37	0	82,22
5.2	Unsur Keuangan	4	0	0	0,00	13	20	0	60,61	38	0	10	
5.3	Unsur Kepegawaian	0	2	0	100,00	0	10	0	100,00	5	25	3	84,85
5.4	Unsur Pendidikan dan Pelatihan	0	1	0	100,00	0	1	0	100,00	0	2	1	100,00
5.5	Unsur Penelitian dan Pengembangan	1	0	0	0,00	0	3	0	100,00	0	4	0	100,00
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan												
6.1	Inspektorat Daerah	0	3	0	100,00	3	1	6	70,00	3	29	1	90,91
7	Unsur Kewilayahan												
7.1	Kecamatan Bangil	0	6	0	100,00	2	13	0	86,67	5	24	6	85,71

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
7.2	Kecamatan Beji	6	0	0	0,00	13	4	1	27,78	26	23	1	48,00
7.3	Kecamatan Gempol	0	6	0	100,00	3	9	1	76,92	14	12	3	51,72
7.4	Kecamatan Kecamatan Gondangwetan	4	0	0	0,00	0	12	0	100,00	0	25	0	100,00
7.5	Kecamatan Grati	2	4	0	66,67	6	9	0	60,00	15	20	0	57,14
7.6	Kecamatan Kejayan	2	2	0	50,00	10	1	0	9,09	20	3	0	13,04
7.7	Kecamatan Kraton	3	1	0	25,00	11	2	0	15,38	7	22	0	75,86
7.8	Kecamatan Lekok	5	1	0	16,67	8	3	0	27,27	19	3	0	13,64
7.9	Kecamatan Lumbang	3	3	0	50,00	9	7	0	43,75	16	24	0	60,00
7.10	Kecamatan Nguling	3	2	0	40,00	0	4	6	100,00	6	12	3	71,43
7.11	Kecamatan Pandaan		2	4	100,00	4	4	5	69,23	8	22	5	77,14
7.12	Kecamatan Pasrepan	2	4	0	66,67	9	7	0	43,75	17	11	0	39,29
7.13	Kecamatan Pohjentrek	6	0	0	0,00	8	8	0	50,00	30	9	0	23,08

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
7.14	Kecamatan Prigen	4	2	0	33,33	4	12	0	75,00	6	12	5	73,91
7.15	Kecamatan Purwodadi	0	6	0	100,00	0	12	0	100,00	1	22	1	95,83
7.16	Kecamatan Purwosari	0	4	0	100,00	1	7	3	90,91	6	18	0	75,00
7.17	Kecamatan Puspo	2	4	0	66,67	8	5	0	38,46	12	19	0	61,29
7.18	Kecamatan Rejoso	3	3	0	50,00	6	9	0	60,00	26	15	0	36,59
7.19	Kecamatan Rembang	4	1	0	20,00	4	6	1	63,64	8	12	1	61,90
7.20	Kecamatan Sukorejo	5	1	0	16,67	4	10	0	71,43	4	33	0	89,19
7.21	Kecamatan Tosari	2	4	0	66,67	8	8	0	50,00	29	16	0	35,56
7.22	Kecamatan Tutur	3	3	0	50,00	10	3	0	23,08	21	4	0	16,00
7.23	Kecamatan Winongan	0	6	0	100,00	6	6	0	50,00	8	7	9	66,67
7.24	Kecamatan Wonorejo	4	2	0	33,33	3	6	0	66,67	8	8	0	50,00
8	Unsur Pemerintahan Umum												

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN	Jumlah Program			Persentase Program Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Kegiatan			Persentase Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)	Jumlah Sub Kegiatan			Persentase Sub Kegiatan Mencapai dan Melebihi Target (%)
		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target		Tidak Mencapai Target	Mencapai Target	Melebihi Target	
8.1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	0	0	0,00	12	0	0		30	5	0	14,29
	Total	131	165	15	57,88	299	471	67	64,28	754	1.240	146	64,77

Sumber: Hasil analisis Tim Penyusun P-RKPD

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 merupakan tahun Pertama periode RPD Kabupaten Pasuruan 2024-2026. Tema RKPD Tahun ini mengarah pada Arah kebijakan RPD Tahun 2024-2026 yang difokuskan pada peningkatan pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan. Tema RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah **"Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah."**

Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan tahun 2024, sebagai suatu langkah kebijakan yang berpijak dari evaluasi capaian kinerja terhadap indikator-indikator keberhasilan pembangunan multi aspek di Kabupaten Pasuruan, termasuk upaya dalam meningkatkan capaian indikator perekonomian daerah, dengan mempertimbangkan kondisi perekenomian global, nasional dan regional serta kondisi perekonomian daerah dengan proyeksi-proyeksi yang dapat dicapai pada tahun 2024 dan tahun selanjutnya. Kerangka ekonomi daerah dan proyeksi perekonomian daerah dapat menjadi landasan untuk menentukan arah kebijakan alokasi keuangan daerah secara optimal melalui suatu pendekatan *money follow program* yang bermuara terhadap pengalokasian anggaran daerah yang efektif dan efisien.

3.1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perubahan arah kebijakan ekonomi Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 didasarkan pada perubahan kondisi yang mengakibatkan perubahan asumsi indikator ekonomi makro Kabupaten Pasuruan. Perubahan tersebut salah satunya adalah perubahan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Pasuruan yang sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi eksternal (nasional dan provinsi) dan pertumbuhan ekonomi internal. Perubahan kondisi tersebut berkaitan dengan data kondisi ekonomitahun 2023 yang telah dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik), karena dalam penyusunan RKPD Tahun 2024, beberapa data ekonomi tahun 2024 masih bersifat perkiraan (berdasarkan target dalam RPD 2024 – 2026). Sedangkan untuk perubahan

RKPD tahun 2024 masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan provinsi, sehingga data perkiraan perubahan tahun 2024 pun mengalami penyesuaian atau rasionalisasi. Perubahan asumsi indikatorekonomi makro Kabupaten Pasuruan sebagaimana dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Capaian dan Perubahan Asumsi Indikator Ekonomi DaerahKabupaten Pasuruan Tahun 2023 – 2024

NO	INDIKATOR	Capaian 2023			Target 2024	
		Kab. Pasuruan	Provinsi Jatim	Nasional	Awal	Perubahan
1.	Angka pertumbuhan ekonomi (%)	5,21	4,95	5,05	5,86	5,86
2.	Angka kemiskinan (%)	9,24	10,35	9,36	8,42	8,42
3.	Tingkat Inflasi (%)	0,22	0,29	0,44	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,48	4,88	5,32	5,81	5,48
5.	Indeks Pembangunan Manusia	70,29	73,38	74,39	70,82	70,82

Secara umum capaian kinerja pada tahun 2023 di bawah target kinerja yang tertuang dalam RPD Tahun 2024 – 2026. Sedangkan perkiraan capaian kinerja tahun 2024, secara umum diharapkan akan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam RPD Tahun 2024–2026. Secara eksternal, sumber pendapatan terbesar Pemerintah Kabupaten Pasuruan adalah transfer dari Pemerintah Pusat baik dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Saat ini Pemerintah perekonomian Nasional. Pemerintah lebih fokus kepada kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal yang diambil mempunyai banyak ragamnya salah satunya insentif pajak yang sangat berpengaruh. Kebijakan yang telah

dirancang oleh Pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti awal dan mengalani peningkatan, tidak hanya itu tujuan lain adalah agar perekonomian Nasional mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang. Demikian juga kondisi perekonomian Kabupaten Pasuruan, secara umum ekonomi makro pada tahun 2023 mengalami kenaikan 5,32 persen.

Berdasarkan PDRB, ada 5 sektor lapangan usaha yang memberikan sumbangsih terbesar pada struktur ekonomi Kabupaten Pasuruan diantaranya : 1) Industri Pengolahan (60,42%); 2) Konstruksi (10,75); Perdagangan Besar Dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (9,94); 4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (5,92); dan 5) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,73). Hal-hal tersebut di atas tentu harus menjadi pertimbangan yang penting dalam melakukan perubahan kebijakan daerah pada tahun 2024, agar perubahan kebijakan penganggaran pembangunan daerah dapat berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan peningkatan aktifitas ekonomi masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Di dalam era otonomi daerah, Pemerintah Pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan. Disisi lainnya, danatransfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung Pemerintah Daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal. Hal ini

terjadi karena sebagian besar APBD Pemerintah Daerah masih digunakan untuk belanja pegawai (gaji), sehingga Pemerintah Daerah kurang leluasa di dalam melaksanakan program pembangunan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjadi tolok ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah semakin tinggi dan ketergantungan terhadap Dana Perimbangan semakin kecil. Adapun realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2020-2022 sebagaimana terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020 s.d 2022

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2020	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**700.151.909.602,40**	**701.199.341.703,47**	**736.238.743.114,30**
4.1.1	Pajak Daerah	360.889.758.442,02	393.593.785.426,11	452.520.753.582,18
4.1.2	Retribusi Daerah	34.236.693.406,00	30.094.738.924,33	33.794.826.500,12
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.724.719.096,00	4.777.764.881,00	4.829.702.733,00
4.1.4	Lain - Lain PAD Yang Sah	300.300.738.658,38	272.733.052.472,03	245.093.460.299,00
4.2	**DANA PERIMBANGAN**	**2.352.250.387.009,00**	**2.452.634.490.954,14**	**2.567.448.223.132,00**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.137.265.579.626,00	2.175.979.517.096,00	2.316.302.794.650,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	214.984.807.383,00	276.654.973.858,14	251.145.428.482,00
4.3	**LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**164.679.420.467,00**	**211.022.488.031,00**	**48.681.891.579,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah	164.679.420.467,00	27.286.176.486,00	1.892.000.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0	183.736.311.545,00	46.789.891.579,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**3.217.081.717.078,40**	**3.364.856.320.688,61**	**3.352.368.857.825,30**

Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan

3.2.2. Analisa dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta

ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada penyusunan perubahan RKPD tahun 2024 ini kebijakan pendapatan daerah sebagian masih digunakan pemulihan perekonomian daerah, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM.

Tabel 3.3
Realisasi Tahun 2023, Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**825.314.982.105,46**	**771.989.316.941**	**826.989.316.941**
4.1.1	Pajak Daerah	503.821.307.548,69	473.617.079.711	528.617.079.711
4.1.2	Retribusi Daerah	39.395.504.706,61	281.817.389.326	281.817.389.326
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.982.159.407,00	4.564.760.005	4.654.760.005
4.1.4	Lain - Lain PAD Yang Sah	277.116.010.443,16	11.900.087.899	11.900.087.899
4.2	**PENDAPATAN TRANFER**	**2.762.461.968.553,00**	**2.854.260.589.920**	**2.941.703.179.525**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.453.704.926.353,00	2.632.925.432.000	2.657.974.567.000
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	308.757.042.200,00	221.335.157.920	283.728.612.525
4.3	**LAIN -LAIN PENDAPATA NDAERAH YANG SAH**	**71.145.556.721,00**	**76.511.878.841**	**76.511.878.841**
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.892.000.000,00		
4.3.3	Lain-lainPendapatan	71.145.556.721,00	76.511.878.841	76.511.878.841

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2023	APBD 2024	Target Perubahan RKPD 2024
	Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**3.658.922.507.379,46**	**3.702.761.785.702,00**	**3.845.204.375.307**

Sumber : BPKPD Kabupaten Pasuruan

3.2.3. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan untuk Perubahan RKPD Tahun 2024, tetap diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Daerah dari sektor :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi :
   a. Pajak Daerah;
   b. Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Pendapatan Transfer
   a. Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat;
   b. Pendapatan Tranfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
   a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang -Perundangan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dilakukan upaya-upaya antara lain:

1. Mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Transfer, antara lain Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;
2. Meningkatkan target Pendapatan Asli Daerah, dari sektor Pajak Daerah, berdasarkan perkembangan data Potensi pajak dan realisasi sampai dengan Triwulan I dan II tahun 2024 serta memperhatikan perubahan

kondisi makro ekonomi, kebijakan/regulasi pemerintah yang memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat;

3. Meningkatkan Pelayanan dan Pengawasan Pajak Daerah Melalui Digitalisasi/inovasi untuk mempermudah pelaporan Pajak dengan menggunakan Aplikasi E-SPTPD dan dalam pengawasan Pajak menggunakan typing Box;
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional guna meningkatkan pendapatan Daerah ;
6. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan.
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
9. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
10. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

3.2.4. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah

Kebijakan Pengelolaan Belanja Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2024 memperhatikan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta mendukung pencapaian target belanja APBD Tahun 2023 untuk menggunakan produk dalam negeri. Memperhatikan Peraturan Menteri

Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentangPenggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Perluasan *earmarked* penggunaan DBHCHT, termasuk untuk kegiatan lain sesuai prioritas dan kebutuhan daerah disamping utamanya digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian daerah.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan kepada belanja yang wajib dan mengikat. Belanja yang mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Setelah terpenuhinya belanja wajib dan mengikat selanjutnya barulah menganggarkan belanja yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran RPD 2024 -2026 khususnya arah kebijakan tahun 2024, berkaitan dengan prioritas pembangunan Daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Dasar Masyarakat;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
3. Peningkatan Daya Saing Daerah Berbasis Potensi Lokal; dan
4. Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Pengangguran.

Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan dengan kewenangan daerah baik itu urusan wajib, urusan pilihan maupun penunjang urusan. Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Pasuruan selalu menjaga konsistensi belanja transfer kepada Pemerintah Desa sebagai salah satu kewajiban mandatori berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesiapan mengantisipasi kondisi keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi, Pemerintah Kabupaten Pasuruan juga menjaga

penganggaran alokasi belanja tidak terduga yang mempedomani kepada peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dituangkan dalam Tabel 3.4 sedangkan untuk Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan Target/Proyeksi Perubahan Belanja Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020 s.d 2022

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2020	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022
2.1	**Belanja Operasi**	**2.070.414.873.308,96**	**2.228.563.488.253,00**	**2.343.945.791.110,45**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.203.142.213.892,00	1.107.837.622.596,00	1.133.803.924.679,00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	706.180.335.963,96	931.053.246.192,00	1.016.509.247.583,00
2.1.5	Belanja Hibah	126.307.448.453,00	156.848.191.841,00	165.372.279.498,45
2.1.6	Belanja bantuan sosial	34.784.875.000,00	32.824.427.624,00	28.260.339.350,00
2.2	**Belanja Modal**	**352.127.050.135,28**	**376.073.722.205,00**	**476.867.550.144,71**
2.2.1	Belanja Tanah	28.408.220,00	70.000.000,00	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	114.363.487.979,20	132.357.240.550,00	185.360.760.023,40
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	94.332.201.680,00	124.218.986.593,00	164.196.619.083,72
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi dan jalanan	135.206.224.587,00	118.793.505.162,00	126.174.394.637,59
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	8.196.727.669,08	633.989.900,00	1.135.776.400,00
				0,00
2.2.6	Belanja aset lainnya	0	0	0
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**172.098.662.694,00**	**33.867.748.961,00**	**11.345.474.996,00**
2.4	**Belanja transfer**	**643.742.646.245,00**	**635.254.924.924,00**	**617.881.430.831,00**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	43.341.894.789,00	40.361.924.322,00	41.704.880.895,00

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2020	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	600.400.751.456,00	594.893.000.602,00	576.176.549.936,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.238.383.232.383,24**	**3.273.759.884.343,00**	**3.450.040.247.082,16**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(21.301.515.304,84)**	**91.096.436.345,61**	**(97.671.389.256,86)**

Sumber : BPKPD Kab Pasuruan

Tabel 3.5.
Realisasi Tahun 2023, Target dan Proyeksi Perubahan Pendapatan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

Kode	Uraian	Realisasi APBD Tahun2023	APBD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
2.1	**Belanja Operasi**	**2.775.916.777.566,00**	**2.953.441.615.135**	**2.973.660.387.987**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.344.049.702.858,00	1.380.460.645.620	1.425.072.227.334
2.1.2	Belanja barang dan jasa	1.199.613.117.763,00	1.326.890.430.174	1.305.414.136.053
2.1.5	Belanja Hibah	214.452.606.945,00	236.422.939.341	233.506.424.600
2.1.6	Belanja bantuan sosial	17.801.350.000,00	9.667.600.000	9.667.600.000
2.2	**Belanja Modal**	**481.539.430.790,00**	**419.902.721.382**	**423.120.727.727**
2.2.1	Belanja Tanah	10.750.000.000,00	0	
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	145.700.341.956,00	124.597.619.108	122.314.874.438
2.2.3	Belanja bangunan dan gedung	138.771.668.985,00	125.662.089.980	124.103.662.293
2.2.4	Belanja Jalan, irigasi danjalanan	184.527.819.839,00	167.108.242.144	174.167.420.846
2.2.5	Belanja aset tetap lainnya	1.789.600.010,00	2.124.694.150	2.124.694.150
2.2.6	Belanja aset lainnya	0,00	41.076.000	410.076.000
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**38.192.672.300,00**	**27.000.0000.000**	**20.059.889.558**
	Belanja Tidak Terduga		27.000.0000.000	20.059.889.558
2.4	**Belanja transfer**	**617.177.655.693,00**	**635.305.601.262**	**628.347.094.742**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	47.007.207.368,00	50.459.294.582	50.459.294.582
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	570.170.448.325,00	584.846306.680	577.887.800.160
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.912.826.536.349,00**	**4.035.649.937.779**	**4.045.188.100.014**
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(397.533.393.478,00)**	**(332.888.152.077)**	**(199.983.724.707)**

Sumber : BPKPD Kab Pasuruan

Secara umum, proyeksi Belanja pada perubahan tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 4.045.188.100.014,00 dari tahun rencana 2024, dimana belanja operasi meningkat menjadi Rp 2.973.660.387.987,00 dan belanja modal menjadi Rp 423.120.727.727,00. Belanja modal mengalami

kenaikan dari sebelumnya dikarenakan Belanja Jalan, irigasi dan jalanan dikarenakan tingkat kerusakan sangat tinggi sehingga dibutuhkan pemeliharaan secara menyeluruh, Sedangkan Untuk Belanja Tidak Terduga dialokasikananggaran sebesar Rp. 20.059.889.558,00. Perubahan RKPD Tahun 2024 berdasarkan surat nomor : 900/300/424.102.2024 perihal pemberitahuan Perubahan Peraturan Bupati Pasuruan No.238 Tahun 2023 tentang penjabaran APBD T.A 2024, Kebijakan belanja daerah tahun 2024 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif, dalam upaya mempercepat Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah, Belanja Daerah diprioritaskan pada arah kebijakan RPD 2024-2026 proyek strategis sebagai sebuah akselerasi pencapaian nyata dari arah kebijakan tahunan, yaitu :

1. Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, penurunan prevalensi stunting, dan AKI-AKB;
2. Pembentukan 25 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
3. Jaminan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (UHC);
4. Penambahan 20 Desa ODF;
5. Pembangunan Kawasan pariwisata AATP;
6. Penataan dan revitalisasi permukiman kumuh seluas 20 Ha;
7. Penyusunan RTBL perkotaan Bangil;
8. Portal satu data;
9. Pusat pengembangan SDM Aparatur; dan
10. Pelaksanaan PILKADA.

3.2.5 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara Pendapatan dan Belanja Daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Perubahan target Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 199.983.724.707,00 yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp. 199.983.724.707,00 sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah adalah sebesar Rp. 0,00. Secara lebih rinci Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun

2020 sampai dengan Tahun 2023 dan Target Perubahan Tahun 2024 dapat dilihatpada Tabel 3.6 dan Tabel 3.7.

Tabel 3.6
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pasuruan
Tahun 2020 s.d 2022

NO	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2020	Realisasi APBD Tahun 2021	Realisasi APBD Tahun 2022
6.1	Penerimaan pembiayaan			
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	302.450.746.781	281.149.231.476	372.245.667.822,04
6.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**302.450.746.781**	**281.149.231.476**	**372.245.667.822,04**
6.2	Pengeluaran pembiayaan			
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**302.450.746.781**	**281.149.231.476**	**274.574.278.565,18**

Sumber : BPKPD Kab Pasuruan

Tabel 3.7
Realisasi dan Target/Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 s.d 2024

NO	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	372.245.667.822,00	340.144.916.160	199.983.724.707
6.1.6	Penerimaan piutang daerah			

NO	Uraian	Realisasi APBD Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Target Perubahan RKPD Tahun 2024
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**372.245.667.822,00**	**340.144.916.160**	**199.983.724.707**
6.2	Pengeluaran pembiayaan		7.256.764.083	0,00
6.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3.256.764.083,00	7.256.764.083	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**3.256.764.083,00**	**7.256.764.083**	**0,00**
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**375.502.431.905,00**	**332.888.152.077**	**199.983.724.707**

Sumber : BPKPD Kab Pasuruan

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA);
2. Proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoptimalkan jenis-jenis penerimaan pembiayaan yang menjadi Piutang Daerah;

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan pada Pemeririntah Kabupaten Pasuruan digunakan untuk penyertaan modal daerah.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026. Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Berdasarkan RPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN		SASARAN
1	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah	1.1.	Meningkatnya produksi sektor-sektor unggulan dan potensial perekonomian daerah
		1.2.	Meningkatnya Iklim Investasi
		1.3.	Meningkatnya kualitas dan pemerataan pembangunan infrastrukstur wilayah
		1.4.	Meningkatnya kualitas lingkungan
2	Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat	2.1.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia
		2.2.	Menurunnya pengangguran
		2.3.	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga
		2.4.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis	3.1.	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

	dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi	3.2.	Meningkatnya birokrasi yang kapabel
		3.3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sumber : RPD Kabupaten Pasuruan Th. 2024-2026

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan tahun 2024 – 2026 yaitu 'Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan' dan tema pembangunan tahun 2024 yaitu "Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah". Selain itu juga memperhatikan hasil identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024.

Sebagai bagian dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Timur, tema pembangunan maupun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan surat edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 050/5871/201.2/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2024.

Tabel 4.2.
Keselarasan Arah Kebijakan, Tema Pembangunan, Permasalahan Strategis-Prioritas Pembangunan Tahun 2024

RPD Tahun 2024-2026 ARAH KEBIJAKAN Tahun 2024 ***Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan***
RKPD Tahun 2024 Tema Pembangunan ***Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah***

Permasalahan Strategis Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024
Belum optimalnya cakupan infrastruktur dasar	01. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat
Masih rendahnya rata-rata dan harapan lama sekolah	
Belum optimalnya implementasi SAKIP	02. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel
Belum optimalnya penyelenggaraan satu data	
Masih rendahnya indeks profesionalitas ASN	
Belum optimalnya pemanfaatan mal pelayanan publik	
Masih rendahnya daya saing produk unggulan	03. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal
Belum optimalnya pengelolaan potensi investasi	
Meningkatnya potensi konflik sosial dampak pemilu dan pilkada serentak	
Masih rendahnya kualitas air permukaan, udara, dan tutupan lahan	
Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja	04. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran
Belum optimalnya pendidikan pranikah	
Masih belum terbangunnya sistem informasi ketahanan pangan daerah	

Sumber : Hasil Analisis Tim

Tabel 4.3.
Persandingan Tema Pembangunan
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat

RKPD Kab. Pasuruan Tahun 2024	RKPD Prov. Jatim Tahun 2024	RKP Tahun 2024
TEMA		
Peningkatan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Daerah	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Sumber: RKPD Kab. Pasuruan, RKPD Jatim, RKP, diolah

Tabel 4.4.
Persandingan/Pemetaan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Pusat

RKPD Kab. Pasuruan Tahun 2024	RKPD Prov. Jatim Tahun 2024	RKP Tahun 2024
PRIORITAS PEMBANGUNAN		
Prioritas pembangunan daerah	**Prioritas pembangunan daerah**	**Arah kebijakan pembangunan nasional**

RKPD Kab. Pasuruan Tahun 2024	RKPD Prov. Jatim Tahun 2024	RKP Tahun 2024
PPD-1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat	Bhakti – 1 : Jatim Sejahtera. "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan Kesejahteraan Sosial"	(01). Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem
PPD-2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Bhakti – 2 : Jatim Kerja. "Memperluas Lapangan Pekerjaan dan Membangun keunggulan Ekonomi"	(02). Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan,
PPD-3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal	Bhakti – 3 : Jatim Cerdas dan Sehat. "Jawa Timur Cerdas dan Sehat, Pelayanan Dasar berkualitas."	(03). Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
PPD-4. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran	Bhakti – 4 : Jatim Akses." Membangun Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Wilayah Terpadu dan Keadilan Akses bagi Masyarakat Pesisir dan Desa Terluar"	(04). Penguatan daya saing usaha
	Bhakti – 5 Jatim Berkah. "Membangun Karakter Masyarakat yang Berbasis nilainilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas."	(05). Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
	Bhakti – 6 : Jatim Agro. "Memajukan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan,	(06). Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas

RKPD Kab. Pasuruan Tahun 2024	RKPD Prov. Jatim Tahun 2024	RKP Tahun 2024
	Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan."	
	Bhakti – 7 : Jatim Berdaya. "Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, MUMDesa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa."	(07). Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
	Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."	(08). Pelaksanaan pemilu 2024
	Bhakti – 9 : Jatim Harmoni. "Menjaga Harmoni Sosial dan Alam dengan Melestarikan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup."	

Sumber: RKPD Kab. Pasuruan, RKPD Jatim, RKP, diolah

Secara komprehensif gambaran umum rencana pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan tahun 2024 disajikan berupa grand design sebagaimana infrografis berikut ini:

"GRAND DESIGN RKPD KAB. PASURUAN TAHUN 2024"

Gambar 4.1 Gra[illegible] Kabupaten Pasuruan

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasuruan, 2023

Prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dijabarkan melalui beberapa strategi yang dilaksanakan bersama secara sinergis oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. PPD-1. Peningkatan pelayanan dasar masyarakat, dijabarkan melalui strategi:
   a. Peningkatan kualitas pendidikan formal dan kesetaraan (kejar paket A/B/C), dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   b. Peningkatan pembinaan keluarga khususnya tentang pangan dan gizi keluarga, dilaksanakan Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
   c. Peningkatan kualitas pelayanan dan SDM kesehatan serta sistem rujukan, dilaksanakan Dinas Kesehatan.
   d. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, serta pengurangan permukiman kumuh, dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

e. Peningkatan antisipasi timbulnya konflik sosial dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah terhadap pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak, dilaksanakan Satpol PP dan Bakesbangpol.

2. PPD-2. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dijabarkan melalui strategi:
   a. Peningkatan penerapan sistem merit, dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
   b. Peningkatan pelayanan publik dan inovasi daerah, dilaksanakan perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, kecamatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Bappelitbangda atau sebutan lain.
   c. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah, dilaksanakan Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bappelitbangda atau sebutan lain.
   d. Peningkatan pengelolaan satu data, dilaksanakan Dinas Kominfo, dan Bappelitbangda atau sebutan lain.
   e. Peningkatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, dilaksanakan Inspektorat.
   f. Peningkatan konektifitas pelayanan ibukota, dilaksanakan Dinas Perhubungan.
   g. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi, dilaksanakan Dinas Kominfo.
3. PPD-3. Peningkatan daya saing daerah berbasis potensi lokal, dijabarkan melalui strategi:
   a. Pengembangan kawasan ekonomi strategis agropolitan dan minapolitan, dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
   b. Pengembangan kawasan pariwisata, dilaksanakan Dinas Pariwisata.
   c. Pengembangan industri kreatif kriya, kuliner, fashion, dan desain komunikasi visual, dilaksanakan Dinas Perindag, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pariwisata.
   d. Iklim investasi yang kondusif, dilaksanakan Dinas PMPT-SP

e. Pengembangan kawasan industri wilayah timur, dilaksanakan Dinas Perindag, serta Dinas SDA, Citpa Karya, dan Tata Ruang.
f. Peningkatan infrastruktur transportasi, dilaksanakan Dinas Perhubungan serta Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
g. Peningkatan kualitas lingkungan, dilaksanakan Dinas Perhubungan.
h. Pengembangan kluster UMK halal, aman dan berkualitas, dilaksanakan Dinas Perindag dan Dinas Koperasi-UKM.

4. PPD-4. Penanggulangan kemiskinan dan penurunan pengangguran, dijabarkan melalui strategi:
   a. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, dilaksanakan Dinas Sosial.
   b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Dinas Koperasi-UKM.
   c. Meningkatkan wirausaha ekonomi kreatif, lembaga ekonomi desa, dilaksanakan Dinas Koperasi-UKM dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
   d. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan.
   e. Peningkatan peran aktif pemuda, dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga
   f. Peningkatan pemberdayaan perempuan, dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
   g. Meningkatkan literasi masyarakat, dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam rangka mewujudkan secara nyata prioritas pembangunan daerah tahun 2024, ditetapkan beberapa proyek strategis, sebagai berikut:

Perwujudan prioritas pembangunan daerah tahun 2024 diimplementasikan berupa program prioritas pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RPKD tahun 2024 sampai dengan triwulan II dan evaluasi kemampuan keuangan daerah, diperlukan penyesuaian pagu indikatif dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka penajaman prioritas

pembangunan daerah dan perwujudan kinerja sasaran pembangunan daerah. Perubahan pagu indikatif dan target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan pendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 pada perubahan RKPD Tahun 20245 sebagaimana dalam Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Program Pendukung Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Pasuruan Tahun 2024

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	PENINGKATAN PELAYANAN DASAR MASYARAKAT								
1	Proyek strategis peningkatan kualitas dan kuantitas PKBM	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka PArtisipasi Murni (APM) SD/MI	%	100	100			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Aangka PArtisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	96	96			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	92,6	92,6			
			Angka Kelulusan Warga Belajar Kesetaraan	%	3500	2210			
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	%	12,6	12,6			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Ruang	1	24	3.120.000.000	2.370.000.000	
		Koordinasi. Perencanaan. Supervisi. dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Dokumen	675	675	50.063.300	50.063.300	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik	3500	2600	5.646.973.900	3.795.045.545	
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan. Pemberian Promosi. Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	290	290	925.000.000	925.000.000	
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	2887	2727	41.949.902.310	40.021.380.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	3842	3792	26.502.200.000	25.897.200.000	
2	**Proyek strategis jaminan perlindungan kesehatan masyarakat (UHC)**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar (%)**	**%**	**100**	**100**			**Dinas Kesehatan**
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan kesehatan sesuai standar**	**%**	**100**	**100**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen	12	12	130.000.000	130.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan Tradisional. Akupuntur. Asuhan Mandiri. dan Tradisional Lainnya	Dokumen	12	12	200.000.000	200.000.000	
		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		12	12	100.000.000	100.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			dan Pasca Krisis Kesehatan						
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat		33	33	217.640.000	217.640.000	
		Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas		12	12	75.000.000	75.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		4	4	991.379.660	991.379.660	
		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di kabupaten/kota		33	33	217.640.000	217.640.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan intervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas		1400	1400	71.232.000	71.232.000	
		Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Fasyankes yang sudah berizin**		**90**	**90**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		33	33	1.374.999.204	1.374.999.204	
		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		33	33	250.000.000	250.000.000	
3	**Proyek strategis Penambahan Desa ODF (20 Desa)**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman**	**%**	**3,95**	**3,95**			**Dinas Perumahan dan Kawasanan Permukiman**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman**	**Kegiatan**	**80**	**80**			
		Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	91	91	11.058.397.579	10.919.160.929	
4	**Proyek strategis Penurunan Prevalensi Stunting**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar**	**%**	**100**	**100**			**Dinas Kesehatan**
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	**Persentase layanan kesehatan sesuai standar**	**%**	**100**	**100**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular**	**%**	**80**	**80**			
			Persentase Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	**%**	**80**	**80**			
			Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Tidak Menular	**%**	**80**	**80**			
			Persentase balita Gizi buruk	**%**	**0,03**	**0,03**			
			Persentase keluarga akses sanitasi bersih/sehat		**90**	**90**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	25093	25093	180.000.000	180.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	93860	93860	80.000.000	80.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	4	4	2.901.079.780	2.901.079.780	
		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen	4	4	1.251.139.000	1.251.139.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	4	4	1.922.745.000	1.922.745.000	
		PROGRAM PEMBINAAN	**Persentase MCPR**	**%**	**73,5**	**73,5**			**DP3AP2KB**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		KELUARGA BERENCANA							
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah Pelaksana Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**%**	**100**	**100**			
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan	kampung kb	39	39	604.500.000	459.500.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Keluarga Berencana)						
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang	2753	2753	1.530.000.000	1.095.500.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	**Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak**	**%**	**88,41**	**88,41**			**Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak**	**%**	**88,41**	**88,41**			
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Unit	83	83	26.468.746.242	26.468.746.242	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	**Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air limbah domestik (layak & aman)**	**%**	**81,83**	**81,83**			**Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang**
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam	**Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi / air**	%	**81,83**	**81,83**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		daerah Kabupaten/Kota	**limbah domestik (layak & aman)**						
		Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari	2	2	2.169.332.000	2.169.332.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	**Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman**	**%**	**3,95**	**3,95**			**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Persentase Penyediaan PSU di perumahan dan kawasan permukiman**	**Kegiatan**	**80**	**80**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Lokasi	91	91	11.058.397.579	10.919.160.929	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**Skor**	**86,5**	**86,5**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase Angka Kecukupan Energi**	**%**	**2100**	**2100**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	8	8	577.927.700	377.108.700	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Penyediaan Sarana Peternakan (%)**	**%**	**5**	**5**			**Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan**
		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah jenis SDG ternak yang dikelola (Jenis)**	**Jenis**	**3**	**3**			
		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	Dokumen	4	4	454.077.937	454.077.937	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase peningkatan produk olahan perikanan**	**%**	**5**	**5**			**Dinas Perikanan**
			Persentase usaha perikanan yang tersertifikasi dan terstandarisasi	**%**	**10**	**10**			
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase produk olahan yang terpromosikan**	**%**	**60**	**60**			
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (ton)	Ton	110.394,27	110.394,27	382.520.000	417.551.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	**Persentase pengolah dan pemasar perikanan yang terlatih**	**%**	**10**	**10**			
		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan (unit usaha)	Unit Usaha	120	120	119.374.400	119.374.400	
5	**Proyek strategis Penurunan AKI - AKB**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN**	**Persentase sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar**	**%**	**100**	**100**			**Dinas Kesehatan**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan kesehatan sesuai standar**	**%**	**100**	**100**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	25093	25093	180.000.000	180.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	93860	93860	80.000.000	80.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	4	4	2.901.079.780	2.901.079.780	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
II	**PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF. EFISIEN. DAN AKUNTABEL**								
1	**Proyek strategis Portal Satu Data**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Data yang berbagi pakai**	**%**	**50**	**50**			**Dinas Komunikasi dan Informatika**
		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	**Data sektoral yang digunakan**	**%**	**50**	**50**			
		Kordinasi. Sinkronisasi. pengumpulan pengolahan analisa diseminasi data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan. Pengolahan. Analisis dan Diseminasi Data	Dokumen	4	4	387.138.000	387.138.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Statistik Sektoral (dokumen)						
2	**Proyek strategis Pusat Pengembangan SDM Aparatur**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Nilai aspek kinerja dan penempatan ASN sesuai formasi dan jabatan**	**Nilai**	**234**	**234**			**BKPSDM**
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	**Nilai pengembangan kompetensi teknis dan fungsional**	**Nilai**	**11**	**11**			
		Pengelolaan Assesment Center	Jumlah dokumen pengelolaan assesment center	dokumen	1	1	50.133.300	50.133.300	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
3	Proyek Strategis PILKADA	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham akan etika dan budaya politik	%	82	82			BAKESBANGPOL
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai	Persentase realisasi kebijakan terkait pendidikan politik. etika buadaya politik dan peningkatan demokrasi	%	100	100			
			Jumlah Parpol yang terfasilitasi mendapatkan bantuan keuangan	Parpol	9	10			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	**Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang**	**Lembar**	**2**	**2**			
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilu/ Pemilu Kepala daerah. serta Pemantauan situasi Politik di daerah	orang	13760	12732	69.601.763.700	69.290.163.700	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	**Persentase Laporan penanganan konflik sosial yang ditindaklanjuti**	**%**	**100**	**100**			BAKESBANGPOL
		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	**Persentase realisasi kebijakan terkait kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di masyarakat**	**%**	**100**	**100**			
			Jumlah Instansi Vertikal yang terfasilitasi mendapatkan bantuan hibah uang	**Lembaga**	**4**	**4**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerjasama Inteligen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing. Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini. Kerja Sama Intelijen. Pemantauan Orang Asing. Tenaga Kerja Asing dan lembaga asing. kewaspadaan Perbatasan antar Negara. Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan. serta penanganan Konflik di daerah	Orang	13500	13500	15.754.054.600	17.633.022.600	
4	**Proyek Strategis Kota Bangil**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)**	**Indeks**	**63,09**	**63,09**			**Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani**	**%**	**8,84**	**8,84**			
		Normalisasi / Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi / Direstorasi	Km	40	40	5.075.042.680	5.075.042.680	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	**Persentase panjang Drainase yang telah dibangun**	**%**	**13,36**	**13,36**			**Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi**
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Panjang Sistem Drainase yang dibangun**	**Meter**	**9000**	**9000**			
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan							

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase panjang jalan yang ditingkatkan dan dipelihara**	**%**	**8,17**	**8,17**			**Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi**
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**'Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan**	**Km**	**190**	**190**			
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	4,18	4,18	30.066.059.940	30.066.059.940	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yg dilakukan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	155,35	155,35	18.264.442.625	18.909.248.625	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
III	**PENINGKATAN DAYA SAINGA DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL**								
1	**Proyek Strategis Pembangunan Kawasan Pariwisata Arjuno Agro Technopark**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase daya tarik wisata bersertifikat CHSE**	**%**	**11**	**11**			**Dinas Pariwisata**
		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola (%)**	**%**	**11**	**11**			
		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	7	7	7.761.175.000	7.611.175.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	**Persentase panjang jalan yang ditingkatkan dan dipelihara**	**%**	**8,17**	**8,17**			**Dinas Bina Marga dan Bina Konsruksi**
		Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**'Panjang jalan kabupaten yang dilakukan peningkatan dan pemeliharaan**	**Km**	**190**	**190**			
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	4,18	4,18	30.066.059.940	30.066.059.940	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yg dilakukan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km	155,35	155,35	18.264.442.625	18.909.248.625	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)**	**Indeks**	**63,09**	**63,09**			**Dinas SDA Cipta Karya dan Tata Ruang**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani**	**%**	**8,84**	**8,84**			
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1	146.720.000	146.720.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	**Persentase UMK yang meningkat kualitas Produknya (Terstandarisasi) dan atau terbentuknya jaringan kemitraan**	**%**	**35**	**35**			**Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	**Jumlah UMK yang meningkat kualitas Produknya dan atau terbentuknya jaringan kemitraan (Unit Usaha)**	**Unit Usaha**	**280**	**280**			
		Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	Unit Usaha	200	200	320.332.000	270.332.000	
		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit usaha yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	Unit Usaha	900	900	745.300.000	460.300.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase sarana pendukung pertanian yang diawasi**	**%**	**0.0333**	**0.0333**	**3.799.454.016**	**2.806.123.016**	**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	**Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi**	**%**	**100**	**100**	**3.799.454.016**	**2.806.123.016**	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	10 Laporan	10 Laporan	2.655.276.316	1.730.876.316	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	**Persentase Penyediaan Prasarana Peternakan**	**%**	**10**	**10**			**Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan**
			Persentase pengembangan Prasarana Peternakan	**%**	**5**	**5**			
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	**Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun (Unit)**	**Unit**	**10**	**10**			
		Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	250.000	250.000	
		Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun. Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	Unit	1	1	400.000.000	400.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	**Persentase peningkatan produk olahan perikanan**	**%**	**5**	**5**			**Dinas Perikanan**
			Persentase usaha perikanan yang tersertifikasi dan terstandarisasi	**%**	**10**	**10**			
		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase produk olahan yang terpromosikan (%)**	**%**	**60**	**60**	**618.696.400**	**653.727.400**	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	120	120	236.176.400	236.176.400	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			yang Terfasilitasi (pelaku usaha)						
IV	PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PENURUNAN PENGANGGURAN								
1	**Proyek Strategis Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Aangka PArtisipasi Murni (APM) SD/MI**	**%**	**100**	**100**			**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
			Aangka PArtisipasi Murni (APM) SMP/MTs	**%**	**96**	**96**			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	**%**	**92,6**	**92,6**			
			Angka Kelulusan Warga Belajar Kesetaraan	**Orang**	**3500**	**2210**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan dasar**	**%**	**94,1**	**94,2**			
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	657	657	109.867.210.000	109.867.210.000	
		Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama**	**%**	**84,2**	**84,2**			
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	439	415	3.715.000.000	3.600.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan**	**%**	**12,6**	**12,6**			
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	3842	3792	26.502.200.000	25.897.200.000	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Persentase sarana dan prasarana Kesehatan sesuai standar**	**%**	**100**	**100**			**Dinas Kesehatan**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar (persen)**	**%**	**70**	**70**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan intervensi masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga	1400	1400	71.232.000	71.232.000	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase layanan kesehatan sesuai standar**	**%**	**100**	**100**			
			Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Menular	**%**	**80**	**80**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Persentase Imunisasi Rutin Lengkap (IRL)	**%**	**80**	**80**			
			Presentase Pelayanan Kasus Penyakit Tidak Menular	**%**	**80**	**80**			
			Persentase balita Gizi buruk	**%**	**0,03**	**0,03**			
			Persentase keluarga akses sanitasi bersih/sehat	**%**	**90**	**90**			
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	25093	25093	180.000.000	180.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	23953	23953	80.000.000	80.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	24047	24047	80.000.000	497.806.560	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	93860	93860	80.000.000	80.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	217968	217968	230.000.000	230.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1112308	1112308	125.000.000	125.000.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	190933	190933	230.000.000	230.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	19818	19818	2.390.857.600	2.390.857.600	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan kesehatan masyarakat	Orang	36	36	144.056.557.132	144.056.557.132	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	**Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)**	**Indeks**	**63,09**	**63,09**			**Dinas SDA Cipta karya dan tata ruang**
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai	**Persentase saluran irigasi / sungai yang tertangani**	**%**	**8,84**	**8,84**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		(WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	1	1	146.720.000	146.720.000	
		Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	72,97	72,97			
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	12	10,4	20.089.226.644	16.975.419.202	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	**Prosentase tercapainya pengembangan perumahan**	**%**	**100**	**100**			**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**
		Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Jumlah dokumen data rumah korban bencana yang disediakan dan direhab atau di lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota**	**Dokumen**	**2**	**1**			
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	3	1	850.000.000	250.000.000	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	**Persentase pengurangan kawasan kumuh**		**22,83**	**22,83**			**Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang direhab		**51,71**	**51,71**			
		Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	**Luas permukiman kumuh yang ditangani secara tuntas**	**Ha**	**124,11**	**124,11**			
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki	Unit Rumah	568	560	9.912.820.920	9.274.948.490	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**Persentase Layanan dan Regulasi Penanggulangan Bencana**	**%**	**100**	**100**			**BPBD**
		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	**Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana**	**Orang**	**3320**	**3320**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting	Orang	3320	3320	1.960.009.000	1.960.009.000	
		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan**	**Orang**	**1**	**1**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Kesiapsiagaan terhadap Bencana						
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	Kawasan	840	840	500.840.000	500.840.000	
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi (Dokumen)	Dokumen	1	1	2.900.000	2.900.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	Keluarga	20	20	29.620.000	29.620.000	
		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban yang dilaksanakan (sesuai ketentuan) (Persen)**	**%**	**100**	**100**			
		Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan. Ditolong. dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	Orang	1000	1000	31.153.000	28.210.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	Orang	200	200	1.786.230.000	1.786.330.000	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase PPKS yang memerlukan Rehabilitasi**	**%**	**100**	**100**			**DINAS SOSIAL**
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Pengemis di Luar Panti Sosial Gelandangan	**Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi**	**%**	**100**	**100**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	112	112	857.500.000	857.500.000	
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	19	19	84.049.895	84.049.895	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	988	988	282.960.740	282.960.740	
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas	Orang	50	50	3.495.000	3.495.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	17	17	17.000.000	17.000.000	
		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pemerlu yang mendapatkan Pelayanan rehabilitasi sosial	%	100	100			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	1.110.000	1.110.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	64.159.500	64.159.500	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	7.983.190	7.983.190	
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	24	24	7.867.500	7.867.500	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	60	60	8.492.500	8.492.500	
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	40	42.400.000	42.400.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Persentase Penerima bantuan sosial sesuai data DTKS**	**%**	**100**	**100**			**DINAS SOSIAL**
		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Data Fakir Miskin yang Valid**	**%**	**100**	**100**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	1	1	2.740.000	2.740.000	
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/ kota yang di data	Keluarga	86571	86571	120.000.266	120.000.266	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	86571	86571	17.847.447.860	17.847.447.860	
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	1	1	3.523.140	3.523.140	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang mendapatkan pelayanan	%	100	100			DINAS SOSIAL
		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	100			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	150	150	91.449.015	8.310.015	
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana	Orang	70	70	332.000	332.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Kewenangan Kabupaten/Kota						
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80	80	285.000	285.000	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	**Persentase Peserta Pelatihan yang lulus uji kompetensi**	**%**	**0,6**	**0,6**			**Dinas Ketenagakerjaan**
		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	**Prosentase Pelaksanaan Pelatihan berbasis Kompetensi**	**Peserta**	**160**	**160**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Peserta	160	160	9.587.627.000	9.587.627.000	
		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Dokumen Kerjasama	Dokumen	12	12	1.000.000	25.000.000	
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per100.000 penduduk perempuan)**	**Rasio**	**9,76**	**9,76**			**DP3AP2KB**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang terstandarisasi**	**layanan**	**30**	**30**			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Layanan	30	30	70.000.000	89.500.000	
		PROGRAM PEMBINAAN	**Persentase MCPR**	**%**	**73,5**	**73,5**			**DP3AP2KB**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		KELUARGA BERENCANA							
		Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**Jumlah Pelaksana Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**%**	**100**	**100**			
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga. Kependudukan. dan	Kampung KB	39	39	604.500.000	459.500.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Keluarga Berencana)						
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	**Persentase Pemanfaatan Infrastruktur Pangan**	**%**	**0,8005**	**0,8005**			**Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian**
		Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan	**Persentase Peningkatan Penyediaan**	**%**	**0,05**	**0,05**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Infrastruktur Pangan**						
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit	1	1	400.660.350	300.660.350	
		PROGRAM PENIGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	**Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**	**Skor**	**86,5**	**86,5**			
		Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	**Persentase Angka Kecukupan Energi**	**%**	**2100**	**2100**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	8	8	577.927.700	377.108.700	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan**	**%**	**97,5**	**97,5**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah pengadaan logistik pelayanan terkait pendaftaran penduduk yang mendukung penataan pendaftaran penduduk**	**%**	**95**	**95**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El. Formulir. dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el. formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	Dokumen	1 dokumen (40.000 blangko KIA)	1 dokumen (40.000 blangko KIA)	51.000.000	51.000.000	
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil	%					
		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	Dokumen					

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang di tingkatkan	Jenis layanan (akta kelahiran. kematian. perkawinan. perceraian. kutipan. perubahan. dkk)	15	15	51.000.000	43.092.188	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten**	**%**	**100**	**100**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Jumlah laporan penyajian database kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan**	**Kecamatan**	**24**	**24**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	Dokumen	288 (24 x 12)	289 (24 x 12)	23.053.420	10.945.420	
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Prosentase pengelolaan profil kependudukan**	**%**	**100**	**100**			**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	**Jumlah kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan**	**PKS**	**5 PKS (2 hak akses dan 3 layanan)**	**5 PKS (2 hak akses dan 3 layanan)**			
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota	Data	260	260	15.775.000	15.775.000	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	**Persentase Pembinaan Perpustkaan Ber-NSP (%)**	**%**	**2,7**	**2,7**			**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
			Persentase Perpustakaan	**%**	**5**	**5**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			yang Berbasis Inklusi Sosial (%)						
		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Kegiatan Pengembangan Minat Baca**	**%**	**100**	**100**			
			Persentase Literasi Berbasis Inklusi Sosial	**%**	**5**	**5**			
			Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi	**%**	**0,23**	**0,23**			
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Lokus	40	40	182.863.000	83.123.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN	**Persentase Peningkatan Produksi**	**%**	**0,3**	**0,3**			**Dinas Perikanan**

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		PERIKANAN TANGKAP	**Perikanan Tangkap**						
			Persentase Produksi Ikan Bernilai Ekonomis	**%**	**12**	**12**			
		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	**Persentase produksi perikanan tangkap di laut**	**%**	**97,75**	**97,75**			
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	896	896	626.922.500	914.143.500	
		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam	**Persentase nelayan yang mendapat pendampingan**	**%**	**5,4**	**5,4**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Daerah Kabupaten/Kota							
		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	80	80	97.435.400	97.435.400	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	3	3	11.155.000	11.155.000	
		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan. Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan. Bantuan Pembiayaan. Kemitraan Usaha	Unit Usaha	2	2	353.883.000	348.438.000	
		Kegiatan Pemberdayaan	**Persentase pembudidaya ikan yang terfasilitasi**	**%**	**8**	**8**			

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Pembudi Daya Ikan Kecil							
		Pemberian Pendampingan. Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan. Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan.Teknologi dan Informasi. Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	30	30	99.877.500	98.597.500	
		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	**Persentase Produktifitas Perikanan Budidaya**	**%**	**4,37**	**4,37**			
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	3	329.210.000	237.730.000	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2	106.944.800	217.291.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	**Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya**	**%**	**1**	**1**			**Dinas Perikanan**
			Persentase Pengendalian Lahan Perikanan Budidaya	**%**	**70**	**70**			
		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	**Persentase pembudidaya ikan yang terfasilitasi**	**%**	**8**	**8**			
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti	Kelompok	10	10	91.518.000	90.192.550	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH/ PROYEK STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SATUAN)	SATUAN	TARGET INDIKATOR KINERJA		PAGU INDIKATIF		PERANGKAT DAERAH PELAKSANA
					AWAL	PERUBAHAN	AWAL	PERUBAHAN	
			Pengembangan Kapasitas						

Perubahan RKPD Tahun 2024 memberikan ruang untuk melakukan penyesuaian target kinerja IKU dan IKD tahun 2024 yang ditetapkan di awal (penyusunan RKPD tahun 2024). Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan. antara lain hasil capaian tahun 2023. yang belum diketahui pada saat penyusunan RKPD Tahun 2024. Penyesuaian tersebut disajikan pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7.

Tabel 4.6.
Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	
				Awal	Perubahan
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.21	5.86	5.86
2	Persentase Penduduk Miskin	%	9.24	8.42	8.42
3	Indeks Pembangunan Manusia* (IPM)	-	70.29	70.82	70.82
4	Indeks Gini	-	0.314	0.310	0.310
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.48	5.81	5.48
6	Pendapatan Perkapita	Ribu Rupiah	113.68	117.64	117.64
7	Indeks Reformasi Birokrasi	-	68.68 (B)	68.04 (B)	68.68 (B)
8	Indeks Wiliamson	-	0.253	0.251	0.251
9	Nilai PDRB kategori Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan (ADHK)	Juta Rupiah	5.890.840.5	5.971.224.9	5.971.224.9
10	Nilai PDRB kategori Industri Pengolahan (ADHK)	Juta Rupiah	72.106.244.5	72.486.250.1	72.486.250.1
11	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rupiah	12.247.18	9.300	12.247.18
12	Indeks Infrastruktur Wilayah	-	38.59	47.27	47.27
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	-	65.47	62.504	65.47
14	Indeks Risiko Bencana	-	116.77	125.5	125.5

No.	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024	
				Awal	Perubahan
15	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	91.08	91.22	91.22
16	Indeks Pembangunan Keluarga	-	61.43	57.10	61.43
17	Indeks Ketahanan Pangan	-	79.87	78.39	79.87
18	Nilai SAKIP	-	77.53 (B)	80.30 (A)	80.30 (A)
19	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	WTP	WTP	WTP
20	Indeks Profesionalitas ASN	-	71.17	54.77	71.17
21	Indeks SPBE	-	2.47	2.50	2.50
22	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	92.24	90.40	92.24

Tabel 4.7.
Penyesuaian/Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Tahun 2024

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
1	**Pendidikan**	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	77.16	89.40	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	95.41	94.10	95.50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	88.98	84.20	89	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	53.44	12.60	100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**Kesehatan**	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	0.0713	0.0713	0.0713	DINAS KESEHATAN
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	%	0.0713	0.0713	0.0713	DINAS KESEHATAN
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	DINAS KESEHATAN
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74.20	74.90	74.90	DINAS SDA. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses	%	74.72	88.41	88.41	DINAS SDA. CIPTA KARYA

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota					DAN TATA RUANG
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70.35	81.83	81.83	DINAS SDA. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	%	30.06	31.76	31.76	DINAS SDA. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	79.89	79.90	79.90	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
		Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	33.59	35	35	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
4	**Perumahan Rakyat**	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten	%	100	100	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten yang ditangani	%	17.64	21.19	21.19	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5.40	4.87	4.87	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5	**Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	122.62	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	73.01	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	110.77	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	2.33	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	0.81	100	100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
6	**Sosial**	Persentase penyandang disabilitas terlantar.	%	54.97	78	78	DINAS SOSIAL

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		anak terlantar. lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)					
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	%	100	100	100	DINAS SOSIAL
7	**Tenaga Kerja**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70.59	70.55	70.59	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	93.46	94	94	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	128.152.480	128.487.176	128.487.176	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB. LKS Bipartit. Struktur Skala Upah. dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	9.23	9.58	9.58	DINAS KETENAGAKERJAAN
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	%	40.67	41	41	DINAS KETENAGAKERJAAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	23.05	23.10	23.10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0.010	0.008	0.008	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	9.50	9.20	9.50	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	**Pangan**	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	100.27	101.56	101.56	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
10	**Pertanahan**	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	100	100	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Ha	100	4.80	100	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	m2	-	1.000.21	-	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Sengketa	1	3	1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11	**Lingkungan Hidup**	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten	%	22.08	45		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	55.56	52	55.56	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	Perekaman KTP Elektronik	%	98.39	98.82	98.82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	31.83	35	35	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang	%	88.64	87.5	87.5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Mempunyai Akte Kelahiran					PENCATATAN SIPIL
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	7.14	10.10	10.10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
13	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	100	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	83.13	28.79	84.50	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	1.92	1.90	1.90	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	79.95	80.25	80.25	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	4.24	4.04	4	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGA

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							N ANAK. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	**Perhubungan**	Rasio Konektivitas	%	39	42	42	DINAS PERHUBUNGAN
		Kinerja Lalu lintas Kabupaten/kota	%	0.367	0.35	0.367	DINAS PERHUBUNGAN
16	**komunikasi dan Informatika**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	70	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	93.94	38	94	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik. Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	17.13	21.7	21.7	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	**Kopertasi. Usaha Kecil dan Menengah**	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	25.48	22.81	25.48	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0.12	0.18	0.18	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	**Penanaman Modal**	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Pasuruan	%	31.51	1.01	1.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	**Kepemudaan dan Olahraga**	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.0096	0.013	0.013	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	8.8260	9	9	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Peningkatan prestasi olahraga	%	94	20	94	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
20	**Statistik**	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	62	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	62	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
21	**Persandian**	Tingkat keamanan informasi Pemerintah	%	49.92	62.02	62.02	DINAS KOMUNIKASI

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							DAN INFORMATIKA
22	**Kebudayaan**	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	2.18	7.70	7.70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
23	**Perpustakaan**	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	62.5	85	85	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	10.01	8.60	10.05	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
24	**Kearsipan**	Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	-	75	78	78	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara. pemerintahan. pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-	16.67	16.77	45.55	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
25	**Kelautan dan Perikanan**	Jumlah Total Produksi Perikanan	Ton	47.431.23	44.339.52	47.431.23	DINAS PERIKANAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		(Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton (Tangkap)	23.887.40	23.713.43	23.887.40	DINAS PERIKANAN
			Ton (Budidaya)	23.543.83	20.626.09	20.626.09	DINAS PERIKANAN
26	**Pariwisata**	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	16.08	20	20	DINAS PARIWISATA
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	-2.11	20	20	DINAS PARIWISATA
		Tingkat hunian akomodasi	%	51	51.05	51.05	DINAS PARIWISATA
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp	31.068.340	31.440.583	31.440.583	DINAS PARIWISATA
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	691.367.000	741.367.000	741.367.000	DINAS PARIWISATA
27	**Pertanian**	Produktivitas pertanian per hektar per tahun					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Tanaman Pangan :					DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Padi (Ton/Ha)	Ton/Ha	6.07	6.0722	6.0722	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Jagung (Ton/Ha)	Ton/Ha	6.57	6.46	6.57	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Kedelai (Ton/Ha)	Ton/Ha	2.30	1.92	2.30	DINAS KETAHANAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							PANGAN DAN PERTANIAN
		Tanaman Buah Tahunan Kg/Pohon	Kg/Pohon	286.33	90.8	100	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Tanaman Sayur (Ton/Ha)	Ton/Ha	35.94	36.13	36.94	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Tanaman Hias Tangkai/m2)	Tangkai/m2	72.62	20.18	72.62	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	%	-81.24	2	2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
28	**Perdagangan**	Persentase alat – alat ukur. takar. timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	87.57	92.73	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
29	**Perindustrian**	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	22.05	9.9	9.9	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan	%	30	30	30	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
		Industri Kabupaten/Kota)					
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
30	**Pengadaan**	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	189.94	17	78	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA. SEKRETARIAT DAERAH
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	60	55	60	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA. SEKRETARIAT DAERAH
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro. Usaha Kecil. dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	%	12	10	51	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA. SEKRETARIAT DAERAH
31	**Kepegawaian**	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		a. Pendidikan Tinggi	%	54.98	66.65	66.65	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							DAYA MANUSIA
		b. Menengah	%	39.7	29.39	29.39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		c. Dasar	%	5.32	4.26	4.26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	13.95	13.13	13.13	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	50.14	43.79	43.79	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
32	**Manajemen Keuangan**	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-4.58	-7.85	-7.85	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	21.26	1.5	1.5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Manajemen Aset	-	2.755.315	2.790.105	4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							DAN PENDAPATAN DAERAH
			Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Ya/Tidak	Ya	Ya	Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
			Ya/Tidak	Ya	Tidak	Tidak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	5.30	1.98	1.98	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
33	**Perencanaan dan Keuangan**	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	-	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
		Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	6.06	9.17	9.17	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

No.	Urusan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Awal	Perubahan	
							PENDAPATAN DAERAH
		Rasio PAD	%	22.56	20.04	22.60	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	77.30	77.08	77.30	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan perubahan rencana kerja dan pendanaan daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja dan kebutuhan penganggaran sebelum dan sesudah dilakukan perubahan dengan disertai alasan perubahannya. Perubahan terhadap rencana program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024 disusun berdasarkan pada beberapa hal, sebagai berikut :

1. Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
2. Adanya pergeseran-pergeseran anggaran antar kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah; dan
3. Penyesuaian nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan pada dana transfer (DAK dan DBHCHT) dan perubahan peraturan penggunaan dana transfer (DBHCHT).

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan RKPD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024. Rencana kerja dan pendanaan dijabarkan menurut perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang pembentukan kelembagaan dan peraturan bupati tentang uraian tugas perangkat daerah. Uraian rencana kerja dan pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dijabarkan di Lampiran Perubahan RKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 tabel 5.1.

BAB VI

P E N U T U P

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan bagian penting dari rangkaian Perencanaan Tahun 2024 dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah, *stakeholder,* masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Pasuruan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program-program dalam Perubahan RKPD Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya;
2. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Akibat terjadinya perkembangan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD sebagai dasar atas perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024, untuk selanjutnya menjadi dasar menyusun Perubahan APBD untuk Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI PASURUAN,

ANDRIYANTO

KABUPATEN PASURUAN

GUNA KARYA SARANA BHAKTI